

URGENSI PENGUATAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN SUBNASIONAL DI KOTA PADANG PASCA GEMPA 2009: STUDI TENTANG REPOSISI ETNIS CINA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK LOKAL

Jumhari

Abstract

After earthquake disaster occurred on 30 September 2009, the government of Padang city and its people is not only faced with the question on Padang economic recovery and rebuilding efforts on city infrastructure but also on issue on how to reconstruct the social structure of local population which was torn due to the handling and management of victims of post days of earthquake. One main issue is the emergence of apriori attitude felt by Chinese residents toward the neglected and discriminative attitude of government. However, it raises social solidarity amongst them post earthquake. As a minority group, Chinese is not only susceptible to economic issues, they are also vulnerable to social and cultural issues, including in the case of post-earthquake in Padang. Strengthening on subnational awareness within Chinese society reemerges when Padang municipal government in the early 2012 is about to demolish unload Gate of Friends Amical Association (Gapura Himpunan Tjinta Teman), one of Chinese cultural symbols built by Chinese ethnic in Padang as a form of solidarity. Thus, the campaigns and slogans glorifying the recognition of the diversity of life constantly voiced by Padang government becoming counterproductive and paradox in viewing social phenomena and empirical facts concerning government relations and their minority citizens. It is because the efforts to rebuild the pieces of social solidarity that has been torn, is in fact, it is not a simple task. To establishing uniformity in diversity takes commitment and consistent recognition as to create city residents that is more cultured and dignified in the future. This paper sees the struggle of Chinese people in Padang in their effort to

reclaim the cultural symbols in public spaces after the earthquake occurred in 2009 and the emergence of dispute regarding the existence of Gate of Friends Amical Association (Gapura Himpunan Tjinta Teman) in Pecinan Padang area in early 2012 through field research and theoretical studies in analyzing the relationship between public policy and minority groups.

Keywords: Subnational Citizenship, Chinese, Public Policy, Local Politics, Padang

Pendahuluan

Diskursus mengenai relasi etnis Cina dengan penguasa maupun masyarakat lokal dimana mereka berada, senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Sebagai kelompok minoritas yang menguasai ekonomi nasional, orang Cina senantiasa berada dalam posisi yang dilematis, disatu sisi mereka dianggap sebagai lokomotif perekonomian nasional, akan tetapi disisi lain mereka acap kali menjadi sasaran kemarahan publik atas terciptanya kesenjangan sosial ekonomi.¹ Terlebih lagi dengan adanya anggapan tentang *stereotype* orang Cina yang cenderung eksklusif dan enggan berbaur dengan masyarakat lokal dimana mereka bermukim.

Cerita sukses kaum "*hoakiau*"² tidaklah mereka peroleh dalam waktu singkat, akan tetapi melalui rentang waktu dan proses panjang selama dalam perantauan mereka di kawasan lautan selatan- Asia Tenggara- pada saat ini. Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi kelompok etnis ini, selain karena etos kerja kerasnya dalam berdagang (berniaga), juga karena posisi mereka yang diuntungkan sebagai pedagang perantara (*middlemen*) antara pribumi dan penguasa kolonial. Dalam konteks perekonomian Padang, menarik apa yang dinyatakan oleh Erniwati, bahwa posisi etnis Cina seimbang keduduknya dengan etnis Minangkabau dalam bidang ekonomi. (Erniwati, 2011: 2). Tentunya fenomena menjadi menarik bila dibandingkan keadaan ekonomi di beberapa kota besar lainnya di Indonesia, yang pada umumnya didominasi oleh etnis Cina.

Spektrum politik, ekonomi dan sosial budaya yang senantiasa berubah,

1 Dalam sejarah kerusuhan rasial yang melibatkan etnik Cina dengan kelompok pribumi di tanah air kesenjangan dibidang ekonomi menjadi salah satu alasan munculnya kerusuhan, meskipun tidak mengabaikan faktor lain seperti politik maupun sosial budaya. Bahkan lahirnya gerakan *nativisme* dan *revivalisme* seperti SI dan gerakan sosial lainnya juga muncul karena alasan tersebut diatas. Untuk jelasnya baca karya Takashi Shiraishi, "*Zaman Bergerak*", *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Grafiti Press, Jakarta, 1997.

2 Istilah *hoakiau -chinese overseas-* dipergunakan untuk menyebut kelompok Cina yang tinggal diperantauan. Lihat Pramoedy Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Garba Budaya, Jakarta, 1988.

seiring dengan perubahan rezim, turut memperumit orientasi politik dan ekonomi orang Cina di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan nasional, Orde Lama, Orde Baru bahkan sampai lahirnya Orde Reformasi. Pasca kemerdekaan usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menerapkan kebijakan 'politik benteng' untuk memperkuat dukungan modal dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pengusaha pribumi ternyata tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya justru yang melahirkan kolaborasi antara pengusaha dari kalangan etnis Cina dengan segelintir elit pengusaha pribumi, yang dikenal istilah sistem 'Ali-Baba', untuk menjalankan usaha dagang mereka yang mendapat dukungan dana dari pemerintah. (Suryadinata, 1984: 135-137).³ Kemudian pada periode akhir tahun 1950-an pemerintah Orde Lama mengeluarkan kebijakan larangan orang asing (Cina WNA) untuk berusaha di bidang perdagangan eceran dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 10 tanggal 16 November 1959. (*Ibid* :140). Dimasa Orde baru mentalitas 'Ali-Baba' tetap bertahan dengan memunculkan aliansi pribumi-Cina baru di bidang ekonomi yakni, dengan dikenal sistem cukong (*cukongisme*).

Dibidang sosial dan budaya, seperti pendidikan dan kehidupan sosial pasca Gerakan 30 September 1965, etnis Cina harus melakukan perubahan identitas dan penyesuaian diri sesuai dengan garis kebijakan pemerintahan Soeharto, seperti penutupan sekolah berbahasa Cina dan mengganti nama Cina dengan nama lokal Indonesia. (Hari Poerwanto, 2005). Dan puncaknya ketika angin politik perubahan berlangsung pada tahun 1998 (reformasi), stabilitas semu Orde Baru berubah menjadi gerakan anarki massa, dan lagi-lagi kelompok etnis Cina menjadi tumbal dari perubahan politik ini. (Pattiradjawane dalam I. Wibowo, 2000).

Fenomena sosio-kultural yang menarik pasca keruntuhan rezim Orde Baru, adalah kebangkitan keyakinan dan harga diri etnis Cina di Indonesia. Mereka tidak lagi diam, bersembunyi dalam bayang-bayang traumatis akibat pengalaman perlakuan diskriminasi sosial, mereka mulai membuka diri, baik melalui perkumpulan, organisasi kemasyarakatan ataupun terlibat dalam politik praktis. Terlebih sejak Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan Keppres No. 6/2000 yang mencabut Inpres No.17/1967 yang memberikan kebebasan etnis Cina untuk merayakan hari raya dan

3 Sistem Benteng mulai diperkenalkan pada tahun 1950-an, ketika Juanda yang menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan dalam kabinet RIS (Republik Indonesia Serikat) mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi 'para importer nasional' Indonesia agar dapat bersaing dengan importer luar negeri. Ternyata sistem benteng ini gagal melahirkan wirausahawan pribumi yang tangguh, salah satunya karena minim pengalaman pribumi dalam bidang ekonomi serta posisi ekonomi etnis yang masih kuat.

tradisi leluhur mereka. (Erniwati, *op.cit*: 3). Keputusan politik pemerintahan Gus Dur, semakin kukuh dengan disahkannya *Imlek*, hari libur nasional oleh Presiden Megawati pada tahun 2002 serta penghapusan diskriminasi kewarnegaraan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang mengeluarkan UU Kewarnegaraan RI No. 12/2006. Sehingga *marwah* orang Cina sebagai sebuah identitas kelompok masyarakat, yang menjadi bagian dari kelompok etnis yang tinggal di Indonesia mulai mendapat tempat yang semestinya.

Dalam konteks masyarakat Cina yang bermukim di Padang, jauh sebelum adanya perubahan tersebut. Mereka masih dapat mengekspresikan tradisi leluhur mereka sepanjang tidak melanggar norma adat masyarakat Minangkabau sebagai mayoritas penduduk Kota Padang yang dikenal lekat dengan 'adat basandi syara, syara basndi kitabullah'. Menurut Erniwati sejak masa kolonial, pelaksanaan budaya dan tradisi leluhur etnis Cina di Padang telah diatur dan dikleola oleh perhimpunan keluarga (marga) dan perhimpunan kematian, Himpunan Tjinta Teman (HTT) serta Himpunan Bersatu Teguh (HBT). Bahkan salah satu kesenian khas orang Cina Padang 'Sipasan' yang hanya ditemukan di Kota Padang, selalu dipentaskan dalam perayaan hari-hari besar orang Cina atau perayaan ulang tahun Kota Padang.⁴ Artinya dalam ruang lingkup lokalitas-Padang- tidak terjadi pembatasan bagi etnis Cina untuk berinteraksi dan bersosialisasi sebagai bagian dari warga kota Padang lainnya meskipun bertentangan dengan kebijakan negara.

Etnis Cina yang tinggal di Padang merupakan kelompok 3 (tiga) etnis terbesar penduduk yang mendiami Kota Padang, yakni 1,90%, dibawah etnis Jawa (3,29%) dan mayoritas etnis Minangkabau (90,07%). Sedangkan jumlah etnis Cina secara keseluruhan yang tinggal di Sumatera Barat pada tahun 2000, berjumlah 15.029 jiwa (0,35%) dari 4.241.256 jiwa penduduk Sumatera Barat (Suryadinata dkk, 2003:86).

Dalam konteks sejarah relasi antara etnis Cina dan masyarakat lokal (Minangkabau) yang tinggal di Padang, jarang ditemukan adanya konflik etnis diantara mereka. Pengalaman buruk yang dialami oleh etnis Cina, baik pada masa kolonial, maupun pada periode krusial, seperti pada transisi pergantian pemerintahan, yang acap kali menjadikan etnis Cina menjadi sasaran kekecewaan dan amuk massa, seperti di kota-kota lainnya di Indonesia, tidak pernah terjadi di Padang. Bahkan ketika terjadi peristiwa

⁴ Sipasan merupakan arak-arakan yang terbuat dari kursi kayu, diatas kursi kayu ini, duduk berjejer anak-anak kecil yang mengenakan kostum tradisional Cina yang berkeliling di kampung Pondok (*Pecinan*).

Mei 1998, ketika di Jakarta dan Solo terjadi amuk massa, justru pemerintah, aparat keamanan dan warga kota Padang yang tinggal berdampingan dengan *kampung pondok*, tempat konsentrasi pemukiman Cina di Padang, secara bersama-sama menjaga keamanan warga Cina Padang dari serbuan massa yang berasal dari luar kota Padang, yang hendak memanfaatkan situasi saat itu. (Erniwati, *op.cit*: 7).

Keharmonisan ini tiba-tiba berubah, ketika Publik kota Padang pasca gempa 30 September 2009, mendengar berita tentang terjadinya diskriminasi terhadap etnis Cina yang tersebar di media jejaring sosial, seperti *facebook*, *twitter* dan lainnya. Keadaan ini diperburuk dengan pindahnya beberapa orang dari kalangan etnis Cina yang memilih meninggalkan Kota Padang, yang porak-poranda akibat musibah gempa tersebut. (Kompas, 19 September 2010). Jika ditelisik lebih lanjut, persoalan perlakuan pemerintah Kota Padang yang kelihatan bias kepentingan, sebetulnya tidak hanya menimpa warga etnis Cina, sebab banyak juga warga pribumi lainnya yang mengalami nasib serupa. Barangkali persoalannya adalah menyangkut komunikasi dan keterbatasan infrastruktur serta tidak cepat tanggapnya aparat pemerintah didalam mengatasi keluhan warga kota Padang yang menjadi korban musibah gempa itu, termasuk dari kalangan etnis Cina.

Persoalan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah kota Padang terkait dengan kebijakan publik atas penanganan gempa kemudian perlahan-lahan lenyap dari peredaran, seiring dengan menggeliatnya warga kota Padang untuk menanta kehidupan sosial ekonomi dan budaya pasca gempa 30 September 2009. Pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, publik Kota Padang kembali mendapat berita tentang terjadinya perselisihan antara warga Etnis Cina Padang yang tergabung dalam HTT (Himpunan Tjinta Teman-Hok Tek Tong) dengan pihak Pemko Padang terkait rencana pembongkaran gerbang HTT.⁵ Tentu hal ini terlihat paradoks ditengah kampanye dan slogan tentang adanya pengakuan atas keberagaman dalam kehidupan bersama warga kota Padang yang senantiasa diteriakkan oleh pemerintah Kota Padang, dengan mottonya 'Kota Padang, Kujaga dan Kubela'. Selain itu kenyataan tersebut menjadi hal yang kontraproduktif dan ironis, terkait dengan fenomena sosial dan fakta

⁵ Perselisihan antara pihak HTT dan Pemko Padang, (Dinas Tata Ruang Kota) menjadi rubrik berita Kota Padang dari akhir tahun 2011-akhir Mei 2012, perselisihan ini pada akhirnya dibawa ke sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Padang. Dan berdasarkan keputusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan HTT untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Gapura No. 640/2.04/DTRTB-P.P, 2012 tanggal 6 Februari 2012. Artinya gapura yang dibangun HTT di Kampung Pondok tidak melanggar Perda tentang Tata Ruang Kota Padang. Meskipun sampai paper ini ditulis pihak Pengacara Pemko Padang, masih mengajukan keberatan. (Haluan, 30 Mei 2012).

empirik menyangkut relasi pemerintah dan kelompok minoritas warganya. Sebab usaha untuk merekatkan dan membangun kembali kepingan-kepingan solidaritas sosial yang sempat terkoyak, bukanlah pekerjaan yang sederhana. Sebab membangun keseragaman dalam keberagaman dibutuhkan adanya komitmen dan pengakuan yang konsisten, ketika ingin menciptakan warga-kota yang lebih berbudaya dan bermartabat di masa yang akan datang. Paper sederhana ingin melihat sejauh mana pergulatan dan perjuangan kewarganegaran subnasional-Cina- di kota Padang dalam upaya merebut kembali simbol kultural di ruang publik pasca gempa 2009, serta munculnya sengketa menyangkut keberadaan *gapura* HTT di Pecinan Padang pada awal tahun 2012 terkait dengan reposisi Etnis Cina terhadap kebijakan publik dan politik lokal melalui melalui riset lapangan dan kajian teoritis, menyangkut relasi kebijakan publik dan kelompok minoritas.

Padang: Rantau Minangkabau dan Komunitas Cina

Dalam konsepsi tradisional mengenai alam Minangkabau yang bersumber pada *tambo*, dinyatakan bahwa daerah Minangkabau terdiri dari darek (*luhak nan tigo*) dan rantau. Daerah darek dianggap sebagai asal atau inti dari pemangku kebudayaan Minangkabau, sedangkan rantau merupakan kawasan pinggiran yang sekaligus merupakan daerah perbatasan dari alam Minangkabau. (Yunus dalam Koentjaraningrat, 1988: 248, Navis, 1984: 53, Naim, 1984: 61). Secara simbolis batas alam Minangkabau yang terdapat dalam *tambo* memberikan tamsilan sebagai berikut: : “*Dari riak nan badabur, Siuluk punai mati, Sirangkak nan badangkung, Buaya Putih, Taratak Air Hitam, Sikilanga Air Bangis sampai ke Durian Ditakuk Rajo.*”

Kota Padang terletak di pantai barat Sumatera, yakni pada 0°44'00" dan 1°08'35" Lintang Selatan, serta diantara 100°34'09" Bujur Timur. Luas Kota Padang berdasarkan PP No.17/1980 yakni 694,96 km² dengan Kecamatan Koto Tangah (232,25 km²) sebagai kecamatan terluas. (BPS Kota Padang, 2009). Iklim di Padang panas dan lembab dengan suhu beragam sepanjang tahun dari 20° C di pagi hari dan 31° C di malam hari. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kota Padang hanya mengenal dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan dengan curah hujan rata-rata 302.35 mm per bulan. Secara geografis Kota Padang berada pada posisi yang strategis yakni menjadi poros utama yang menghubungkan bagian utara (Aceh) dan selatan (Lampung) pesisir pantai barat Sumatera.

Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km, serta beberapa gugusan pulau kecil yang berjumlah 19 pulau, diantaranya adalah Pulau Sikuai, Rokan, Pisang Gadang, Pasumahan dan Cubadak. Kawasan pantai Padang memiliki ketinggian ombak yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata ombak di wilayah Indonesia lainnya, yakni dengan ketinggian 130 cm, yang seringkali mengakibatkan pengikisan pantai sejauh 20 cm/tahun. Orang Padang menyebutnya 'ombak puruih' yang berasal dari bahasa Nias yang berarti menggulung. (Asnan, 2007: 26-27, Anatona, 2005). Setidaknya terdapat (6) enam sungai besar dan 16 (enam belas) sungai kecil yang berperan penting bagi penyuplai irigasi pertanian sawah, diantaranya sungai (*batang*) Air Dingin, Kandis, Arau, Kuranji, Timbunan dan Pisang. Sungai Arau (*Batang Arau*), yang berhulu di Bukit Barisan, merupakan sungai terpenting dengan panjang alirannya 25 km, yang menjadi tempat bermukimnya para penadatang. Di bagian selatan *Batang Arau* merupakan kawasan perbukitan, yang sebenarnya merupakan kaki pegunungan Bukit Barisan, penduduk menyebutnya 'Gunung Padang' untuk bukit yang tinggi dan 'Gunung Monyet' atau Bukit siti Nurbaya untuk bukit yang lebih rendah. Padang memiliki sebuah teluk yang berada dibagian selatan dari Gunung Padang, yang kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dibangun sebuah pelabuhan laut 'Teluk Bayur' (*Emma Haven*), yang berfungsi untuk melayani kebutuhan eksepor batubara dari Ombilin dan semen dari PT. Semen Padang.

Kota Padang merupakan kawasan rantau orang Minangkabau yang berada di pesisir pantai barat Sumatera. Menurut tradisi, Adityawarman mendirikan Kerajaan Minangkabau pada tahun 1347 dan membangun Pagaruyung (dekat Batusangkar) sebagai pusatnya. Sejak kejatuhan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, kawasan pantai barat Sumatera menjadi jalur utama perdagangan dari Cina ke India Padang telah dihuni oleh perantau Minang, jauh sebelum orang Aceh datang. Penyebutan kota memiliki beberapa versi, baik yang berasal dari *tambo* atau versi Hofman seorang *opperkoopman* di Padang pada tahun 1710.⁶ Dalam *tambo* dikisahkan bahwa salah satu perantau dan pemuka masyarakat Minangkabau yang pertama di Padang, Datuk Patih Karsini menemukan sebuah meriam kecil,

6 Hofman merupakan pengarang 'Adat dan Sejarah Minangkabau' terutama menyangkut tentang adat *matrilineal*. Pangkat *opperkoopman* merujuk pada sebutan bagi wakil Belanda yang ditempatkan pada daerah yang belum ditaklukan oleh Belanda, termasuk pada waktu itu Padang, sedangkan daerah yang telah berada dibawah kekuasaan ditempatkan seorang Gubernur, seperti Ambon, Banda, Ternate dan Jawa. Tugas seorang *opperkoopman* yakni mengelola perdagangan dan pengamanan pos-pos perniagaan dari Air Hadji sampai ke Barus, untuk keterangan selanjutnya lihat M.D. Mansoer, *Sedjarah Minangkabau*, Djakarta: Bhratara, 1970, hlm. 103-104.

pisau, serpihan porselin dengan tulisan “*La ilaha’ illallah Moehammad Rasoel Allah*” dalam huruf Arab dan sebilah pedang, yang dijadikan nama tempat ini. (Colombijn, 2006: 55). Sedangkan versi lain menyebutkan, sebutan Padang yakni merujuk pernyataan Hofman, bahwa daerah ini dulunya merupakan tanah luas yang dikelilingi oleh pegunungan. Tempat tersebut menjadi tempat berkumpulnya para pendatang, yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang dan pengumpul garam. (Erniwati, *op.cit*: 29).

Padang tumbuh dari sebuah perkampung kecil menjadi sebuah bandar dagang penting, yang memiliki kedudukan strategis, baik pada masa dibawah kekuasaan Aceh maupun setelah dikuasai oleh VOC. Penduduk kota Padang diperkirakan berasal dari daerah pedalaman (*darek*), seperti dari daerah Solok- Selayo (Amran, 1988: 154-155). Semula mereka menetap di sebelah kiri *batang* Arau-Seberang Padang- yang kemudian bergerak kearah utara dan mendirikan kampung-kampung baru. Semua kampung tersebut bergabung dalam kenagarian Padang, dibawah pimpinan *Nan Dalapan Suku*.⁷ Selain itu penduduk Padang berasal dari migrasi daerah pesisir Minangkabau lainnya, seperti Painan, Pasaman dan Tarusan.

Padang menjadi sentra pengumpulan lada dan emas dari daerah pedalaman Minangkabau yang kemudian dikirim ke Kutaraja (Aceh), yang kemudian diperejual belikan dengan pedagang asing dari Gujarat, Cina dan Eropa yang tidak diperbolehkan bertransaksi langsung dengan pedagang-pedagang di pelabuhan-pelabuhan yang ada disepanjang pesisir pantai barat Sumatera, termasuk Padang. (Dobbin, 1992: 85-89). Pengawasan Aceh yang ketat atas perdagangan di Padang, membut 7 (tujuh) dari penghulu *Nan Dalapan Suku* dibawah *Rang Kayo Kaciek* yang semula bertindak sebagai perantara bagi raja Aceh, pada akhirnya bekerjasama dengan VOC untuk melawan hegemoni Aceh. Sehingga sejak tahun 1663 Padang telah berada dibawah kontrol VOC.

Ketika VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, kedudukan Padang sebagai tempat residen bagi pemerintah kolonial. Dan sejak tahun 1820 pemerintahan melakukan penatan dan pembagian wilayah dalam bentuk kampung (*wijk*), Kota Padang menjadi 8 (delapan) *wijk*.⁸ (Amran,

7 *Nan Dalapan Suku* merupakan suku-suku dan penghulu kaum yang ada di nagari Padang. Pembentukan ini mengacu pada kelarasan yang berlaku di *Luhak Nan Tigo*, yakni pertama, Kelarasan *Bodhi-Chaniago*, yang meliputi Sumagek menjadi Chaniago Sumagek, Mandaliko (Chaniago Mandaliko), Panyalai (Chaniago Panyalai) dan Jambak. Kedua, kelarasan *Koto-Piliang* meliputi Sikumbang (Tanjung Sikumbang), Balai Mansiang (Tanjung Balai-Mansiang), Koto (Tanjung Piliang) dan Melayu.

8 *Wijk* I meliputi kampung Mata Air dan Durian, *Wijk* II meliputi kampung Purus, Damar, Olo dan Pandan, Ujung Pandan dan Rimbo Kaluang, *Wijk* III meliputi kampung *Jao* (Jawa), Sawahan, Belatung, Tarandam dan Jati, *Wijk* IV meliputi kampung Alai dan Gunung Pangilun,

op.cit: 159-162). Selanjutnya berdasarkan Plakat Panjang 1833, sistem *wijk* diganti *kamponghoffd*. Memasuki awal abad XX, Padang berada dibawah kekuasaan Kepala *Afdeeling Assisten Resident van Padang en Ommelanden* pada tahun 1905, yang tentu saja melemahkan kepemimpinan kelompok *Nan Dalapan Suku* sebagai penghulu kaum pertama yang bermukim di Padang. Pada masa akhir kolonial Belanda, yakni ketika propinsi Sumatera Barat telah dibentuk pada tahun 1938, posisi *gemeente* (praja) Padang menjadi *staat gemente* (Kotapraja) sampai ketika Jepang berkuasa di Padang.

Perkembangan pesat bandar Padang, menarik para pendatang untuk menetap dan berniaga di kota Padang, baik dari penduduk lokal (Minangkabau), maupun dari daerah lainnya serta para pedagang asing, seperti Arab, India dan Cina. Penduduk Kota Padang dari abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 menunjukkan adanya heteroginitas, yakni terdiri dari 662 jiwa Eropa, 35.126 jiwa pribumi, 1.140 jiwa Cina, 953 jiwa Timur Asing lainnya menurut hasil sensus tahun 1852. Sedangkan berdasarkan sensus tahun 1920, posisinya berubah, yakni 2.447 jiwa Eropa, 136.216 jiwa pribumi, 6.909 jiwa Cina, 1.190 jiwa Timur Asing lainnya. (Graves, 2007: 92-93). Dalam kelompok Timur Asing lainnya, orang Tamil dan Arab menjadi kelompok pendatang yang turut membentuk kemajemukan Kota Padang. Berbeda dengan etnis Cina yang mengelompok, orang Tamil lebih cepat melebur dengan penduduk pribumi, karena adanya kesamaan agama (Islam).

Tidak keterangan waktu yang persis mengenai kehadiran orang Cina ke Padang. berdasarkan temuan arkeologis yang ditemukan di daerah Rambahan, yakni diketemukannya pecahan keramik Rajakula yang diperkirakan berasal dari Dinasti Han (abad 5-6 Masehi). Selain itu melalau aliran sungai Batanghari, komoditas keramik dibawa sampai ke wilayah ke pedalaman Minangkabau pada masa Dinasti Song (Abad 12-14). (Azwar, 1999: 14-18). Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), rute perdagangan berpindah dari Selat Malaka ke pantai barat Sumatera. Perubahan jalur ini, pada akhirnya menjadikan kota-kota di sepanjang pantai barat Sumatera menjadi bandar dagang yang ramai disinggahi oleh pedagang asing. Kehadiran etnis Cina semakin jelas, sejak VOC berkuasa di Padang. Mereka bertindak sebagai agen pemasok komoditas garam dari Jawa ke Sumatera. Bahkan pada tahun 1663, disebutkan ada seorang

Wijk V, meliputi Parak Gadang, Simpan Haru dan Andalas, *Wijk VI* meliputi Pondok, kampung Cina, Sabalah, Berok dan Belakang Tangsi, *Wijk VII* meliputi Alang Laweh, Ganting, Ranah, Pasar Gadang, Kampung Nias dan Palinggam, *Wijk VIII* meliputi Nanggalo dan Ulak Karang. Serta diperluas dengan membentuk *Wijk IX*, yang meliputi Lubuk Begalung, Sungai Baremah, Perek Laweh dan Gurun Laweh.

Nakhoda Cina dari Banten yang membeli tanah dari Panglima Padang untuk membangun tempat usaha dan rumah kediaman yang berada disekitar sungai (*batang*) Arau. (Erniwati, *op.cit*: 45). Dan sejak tahun 1862, di orang Cina di Padang telah memiliki pemimpin setingkat Letnan. (Colombijn, *op.cit*: 76).

Pemberian konsensi berupa kontrak dagang kepada orang Cina oleh pemerintah kolonial Belanda, menjadikan posisi orang Cina sebagai kelompok *middlemen* semakin dalam mata rantai perekonomian kolonial. Apalagi mereka juga memiliki jaringan perdagangan sesama orang Cina Perantauan yang berada di Penang dan Singapura. Para pedagang Cina tidak saja bertindak bagi pemasok kebutuhan barang impor bagi penduduk Minangkabau yang tinggal dipedalaman. Akan tetapi mereka juga menguasai jaringan perdagangan komodiats ekspor dari pedalaman ke pelabuhan. Bahkan untuk pertama kalinya, seorang Cina Padang, yang bernama Lie Saay pada tahun 1847 berhasil memperoleh kontrak dari pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkut kpoi dari Padang Panjang ke Kayutanam dan mengangkut garam dan barang-barang lain dalam perjalanan baliknya. (Erniwati, *op.cit*: 46).

Pemukiman orang Cina dibangun secara linier mengikuti aliran sungai (*batang*) Arau, yang sebetulnya sudah terbentuk sebelum pemerintah kolonial menerapkan *passenstelsel* (1816) dan *wijkenstelsel* (1820) yang mengatur kehidupan sosial dan pemukiman orang Cina. Pemukiman Cina memiliki karakteristik yang unik, yakni arsitektur rumah mereka dibangun dengan memperhitungkan tata letak (*feng sui*) menghadap ke sungai, gunung, bukit atau laut. Begitu pula orang Cina Padang, yang pada umumnya menghadap ke *batang* Arau, bukit Gado-Gado, Gunung Padang dan Samudera Indonesia. Orang Cina selalu memiliki pola tata ruang pemukiman yang strategis, yang disesuaikan dengan kepentingan dagang mereka. Bangunan ibadah berupa rumah marga, kelenteng dan perkumpulan sosial, budaya dan kematian dengan arsitektur khas Cina masih banyak ditemukan di Padang, seperti Kelenteng See Hien Kiong yang telah berdiri sejak 1841 yang dibangun oleh kelompok orang Cina Padang (orang Tjiang dan Tjoan Tjioe). Selain itu terdapat pasar Tanah Kongsi yang menjadi sentra perdagangan yang mempertemukan orang Cina dengan pedagang Minangkabau. (*Ibid* : 52).

Di Padang sejak ratusan tahun yang lalu sudah berdiri perkumpulan marga dan perkumpulan sosial-budaya dan pemakaman Hong Teek Tong-Himpunan Tjinta Teman (HTT, 1863) dengan Toako pertama Lee

Po Keng dan Heng Beng Tong-Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dengan Toako pertama Oei Kang King. Yang berhak menjadi anggota HBT dan HTT adalah kaum laki-laki (*hiati*) yang telah berusia 17 tahun. Terdapat konsensus, bahwa mereka yang telah masuk menjadi salah satu anggota dari organisasi ini, tidak diperkenalkan menjadi anggota lainnya, misalnya dari anggota HBT berpindah menjadi anggota HTT. Kegiatan utama dari perkumpulan ini, pada dasarnya sama yakni pada kegiatan budaya dan ritual yang berhubungan dengan budaya leluhur mereka, seperti perayaan *Cap Go, Imlek* dan *Ciat Ciu* (makan bersama). (*Ibid*: 65-67).

Padang Pasca Gempa 2009

Bencana alam yang terjadi secara garis besar bersumber pada dua hal, pertama murni merupakan fenomena alam dan kedua akibat perilaku manusia. Bencana alam sebagai fenomena alam tidak dapat dicegah karena terjadinya adalah akibat bekerja mekanisme alam semesta. Namun tidak berarti harus diterima dengan sikap pasrah semata, tetapi harus dimaknai dan ditelaah sebagai adanya hubungan sebab-akibat dan hal itu dijadikan sebagai cara pembelajaran. Dan bencana akibat perilaku manusia, ini berarti terganggunya keseimbangan lingkungan, dimana manusia sebagai aktor utama penyebabnya. Di kalangan ahli kebudayaan, terutama mereka yang menganut paham *environmental determinism*, yang dirintis oleh F. Ratzel, beranggapan bahwa perilaku sosial budaya dari makhluk hidup ditentukan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, tetapi dalam proses pembentukannya lebih ditentukan oleh lingkungan alam tempat mereka bertempat tinggal. Dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan fisik, adanya suatu perubahan, mengharuskan perlunya modifikasi tingkah laku dalam merespon perubahan itu. Dalam menghadapi lingkungan fisik, Sahlins menyatakan bahwa manusia cenderung mendekatinya melalui budaya yang dimilikinya, yaitu sistem simbol, makna dan sistem nilai. (Hari Poerwanto, 2000: 82).

Peristiwa bencana dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam disebabkan adanya perubahan alam secara alami, dampaknya dapat mengganggu kestabilan masyarakat atau kehancuran di wilayah terjadinya bencana itu. Sedangkan bencana sosial umumnya disebabkan oleh adanya hubungan antara manusia yang menimbulkan peristiwa di masyarakat seperti konflik politik, konflik sosial, perang antar suku, perkelahian antar kelompok masyarakat, pencemaran lingkungan dan eksploitasi alam oleh manusia. (Johan, 2007:

1-2). Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan kekeringan yang melanda Indonesia belakangan ini yang disertai dengan bencana sosial menjadikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk. Bencana aklam, seperti gempa bumi disertai tsunami di Aceh (2004), gempa Nias (2005), gempa Yogyakarta (2006), Bengkulu dan Sumatera Barat (2007) serta gempa dahasyat di Sumatera Barat pada tahun 2009. Letusan gunung berapi, seperti gunung Merapi Jawa Tengah (2006) dan Sinabung di Sumatera Utara pada tahun ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakan, mengingat posisi geografis dan geologi wilayah kepulauan Indonesia berada dalam wilayah rawan bencana gempa, karena berada diantara lempeng Indo-Eurasia dan Indo Australia serta berada pada sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Sedangkan bencana sosial menimpa tanah air kita mulai dari krisis moneter (1998), reformasi, konflik bernuasa sara yang terjadi di Ambon, Kalimantan, Poso tahun 2000-an serta bencana sosial akibat lumpur Lampido (2008). Bahaya bencana, terutama bencana alam, diprediksi masih akan melanda Indonesia mengingat posisi geogafis dan geologinya. Sepanjang sejarah bencana Alam di tanah air, setidaknya terungkap bencana alam yang dahasyat dan menjadi peristiwa penting, seperti letusan Gunung Api Tambora (1815), Gunung Krakatau (1883) yang dampaknya sampai ke wilayah Eropa dan Amerika Utara.

Dalam konteks peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, terutama gempa dan juga tsunami dalam sejarah bencana yang pernah terjadi didaerah ini cukup panjang. Misalnya pada tahun 1650, tercatat terjadinya sebuah gempa besar yang berpusat di Mentawai dengan korban yang tidak sedikit dan telah meluluh lantakan daerah ini. (Khairul Jasmi (ed), 2010:3) Kemudian pada tanggal 10 Februari tahun 1797, terjadi pula gempa besar yang meruntuhkan banyak rumah di kota Padang, dengan guncangan yang begitu dahsyat, sehingga banyak tanah yang retak dan malam itu pula diikuti gempa susulan setiap setengah jam. Dan selama lima bulan gempa itu sering terjadi, meskipun guncangannya semakin hari semakin lunak. (Radjab, 1964: 45) Kemudian gempa bumi yang melanda daerah Padang Panjang pada tahun 1926, yang menyebabkan Kota Padang Panjang sebagai salah satu pusat pendidikan dan keagamaan sempat luluh lantak akibat peristiwa gempa ini. Peristiwa gempa ini terjadi pada hari rabu tahun 1926 yang dikenang sebagai gampo hari Rabaa (gempa hari Rabu).

Setelah cukup lama tidak terdengar bencana gempa bumi, pada bulan Maret 2007 terjadi gempa bumi, dengan pusat gempa diduga berada di

daerah Kabupaten Agam. Akibatnya beberapa daerah disekitarnya seperti Tanah Datar, Padang Panjang dan Solok menderita kerusakan, rumah penduduk, fasilitas kesehatan serta sekolah-sekolah rusak akibat gempa ini. Belum selesai *recovery* dan pengantian ganti rugi dan perbaikan oleh pemerintah atas gempa yang terjadi pada tahunh 2007 ini. Tiba-tiba pada pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 terjadi gempa bumi dengan skala yang lebih besar serta dampak yang besar akibat peristiwa gempa ini. Gempa yang terjadi pada jam 17.16 WIB, dengan kekuatan 7,9 SR, dengan pusat gempa pada pada kedalaman 71 Km di 57 Km di Barat Daya Pariaman.

Gempa dengan kekuatan 7,9 SR berlangsung selama 30 detik ini membuat masyarakat kota Padang menjadi panik dan perasaan dan suasana yang mencekam dan memilukan, sebagaimana terekam dalam kutipan narasi reportase gempa bumi oleh harian Singgalang (Khairul Jasmi (ed), *op.cit*: 9), yakni sebagai berikut:

"Gedung berderak, bergemuruh, bergoyang, bagaikan jemuran jala nelayan di tepi pantai saat ditiup badai. Tanah bergerak turun-naik tak beraturan. Bumi ini berguncang hebat. Derap langkah orang-orang dan teriakan kepanikan, menambah suasana kian mencekam. Mereka berlarian secepat kilat, tak peduli apapun, mereka harus segera keluar rumah dan gedung. Sembari terhuyung-huiyung, semua orang berhamburan ke jalanan. Teriakan semakin menjadi-jadi. Sebab, gempa seperti tak berujung. Bumi terus berguncang, meski pekikan manusia semakin membahana memohon belas kasihan. Bumi tak peduli. Sesaat kemudian, puluhan gedung runtuh, ratusan dan bahkan ribuan rumah ambruk."

Eskalasi kerusakan dan dampak serta korban akibat gempa bumi ini, jauh lebih dahsyat dan lebih besar dibandingkan gempa sebelumnya (20007). Kota Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat dilukiskan seperti 'buah rambai dihempaskan' berserak-serak. Setidaknya ada 57 titik penting yang mengalami kerusakan, yang dibagi 3 (tiga) ring pertama (1) meliputi; Hotel Ambacang, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, kampus LIA, Bimbel Gama, Adira Fiannce, kampus STBA Prayoga, Pasar Raya . ring kedua, kerusakan yang melanda kelurahan Pondok, Pasar Simpang Haru, Deretan pertokoan dsekitar jalan Veteran, Jalan Dr. Sutomo, depan Mesjid Nurul Iman, pertokoan depan Taman Melati, Capella dan deretan ruko di Aie Pacah. Sedangkan wilayah yang masuk ring 3 (tiga), meliputi Masjid Muhammadiyah Simpang Haru, , MMC Tarandam, Stikes, Hotel

Rocky, Hayam Weuruk, pemukiman penduduk di Parupuk Tabing Batipuah Panjang, Koto Panjang Iku Koto, Parak Parupuk, Balai gadang dan sekitarnya.

Kerugian ditaksir mencapai Rp. 1.125 triliun dengan korban meninggal 383 orang, 2 hilang, 431 mengalami luka berat, 77 luka ringan dan sebanyak 11 orang korban belum diketahui alamatnya. Kerusakan terbesar terjadi pada sarana pendidikan, dimana fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat 238 buah, rusak seang 211 buah dan ringan 169 buah. Sedangkan rumah penduduk yang mengalami rusak berat 937.587 buah), rusak sedang (38.485 buah) dan rusak ringan (40.406 buah). Kerusakan gedung pemerintahan 59 buah rusak berat, sedang 19 dan kerusakan ringan 14 buah. (*Ibid*: 5-6)

Kota Padang dengan penduduk lebih dari 800 ribu jiwa, merupakan kota pantai yang berhadapan langsung daerah patahan Mentawai, yang berpotensi sebagai sumber terjadinya gempa bumi disertai tsunami sebagaimana peristiwa gempa sebelumnya. Sejak peristiwa gempa disertai tsunami di Aceh (2004) dan gempa di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2007. Pemerintah kota Padang telah berusaha melakukan berbagai persiapan menghadapi bencana. Dengan bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait seperti Japan Institution, LIPI, BPPT, PMI, Unand, UNP, ITB dan Telkom telah menyiapkan program siaga bencana (*disaster preparedness*). Program ini berisi kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana, pembangunan sarana pencegah bencana (*early warning system*) dan media informasi. Bahkan untuk menghadapi bencana gempa bumi, pemko Padang telah mencoba melakukan kegiatan simulasi bencana tsunami dan menetapkan zonasi wilayah mana dari tsunami. Setidaknya ada sejumlah titik, tempat penempatan Peta Siaga Tsunami yang dibagi kedalam enam wilayah: Zona Bahaya (radius 500 m), Zona I (0-5 m/dpl), Zona II(5-10 m/dpl), Zona III (10-25 m/dpl), Zona IV (25-100 m/dpl) dan Zona V (>100 m/dpl). (Effendi, 2007: 77-78)

Bahkan pemerintah kota Padang bekerjasama dengan lembaga lain seperti Unand yang telah membentuk semacam *working group* seperti KOGAMI (Komunitas Siaga Bencana) dan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang bernaung dibawah Dinas Sosial. Untuk menghadapi bencana dalam ruang publik dilakukan pemerintah dan pemimpin agama dengan memajang imbauan moral untuk menjauhi kemaksiatan, seperti pesan "*Takut Bencana Alam Jauhi Perilaku Maksiat*", menggiatkan kegiatan pengajian di Mesjid sebagai cara dan pendekatan secara psikologis dan

emosional dalam menghadapi bencana. Benar kata ungkapan bahwa manusia hanya berusaha, sedangkan semuanya dikembalikan kepada kekuasaan Sang Pencipta. Buktinya gempa 2009 menjadi contoh bagaimana peristiwa alam tidak bisa diperkirakan secara tepat munculnya, manusia hanya bisa memprediksi belaka.

Ketika gempa bumi menimpa Kota Padang serta tahapan rehabilitasi pasca bencana, banyak pihak yang mengusik dan mempertanyakan dimana modal sosial antar sesama warga atau penduduk kota Padang yang mayoritas Minang berjalan sebagaimana mestinya. Pasca gempa kegiatan pemulihan terlihat jelas adanya sikap saling menolong, sebagaimana ungkapan rang Minang "*Kaba baik baimbuan, kaba buruak bahamburan*". Sikap saling membantu terutama antar kerabat dan tetangga dekat masih berjalan. Namun hal ini, tidak berarti segala berjalan normal. Karena ada beberapa hal yang terlihat paradoks, seperti mulai pudarnya kesetiakawanan sosial pada sebagian penduduk kota Padang, seperti ditengah bencana alam, akibat gempa bumi masih sempat ditemui orang melaksanakan pesta *baralek* seperti keadaaan normal dengan musik keras. Dan yang lebih memprihatinkan munculnya mental *pragmatisme* sebagian orang (warga kota Padang) untuk memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh untung sesaat seperti menaikkan harga BBM diatas harga normal, barang kali hal ini bisa dipahami dalam kerangka hukum ekonomi (pasar), yang tentunya menodai prinsip *raso jo pareso* orang Minang.⁹

Persoalan lain yang selama ini telah menjadi isu publik seperti kebijakan jalur evakuasi tsunami dari Simpang Alai menuju Padang By Pass yang belum tuntas menjadi kendala bagi agenda mendesak bagi pemerintah kota Padang untuk segera mengatasinya, terutama menyangkut pembebasan lahan. Sebab dari 427 persil lahan yang harus dibebaskan untuk jalur evakuasi, baru 393 persil yang dapat dibebaskan. Sedangkan sisanya 34 persil lahan belum ada kesepakatan pembebasan lahan dengan pemiliknya. Selain masalah ganti rugi tanah, warga disekitar lahan pembebasan juga mengeluhkan beberapa fasilitas umum yang terkena pelebaran jalur evakuasi, seperti mesjid, balai pemuda dan pos ronda. Karena menyangkut fasilitas umum harus diselesaikan dengan kaum yang mewakafkan tanahnya untuk fasilitas umum ini. Bagi orang Cina Padang yang sempat terdengar merasa didiskriminasikan. Perlahan-lahan dengan melalui pendekatan persuasif, baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat lokal, berhasil diredam isu-isu yang bias kepentingan

⁹ Lihat berita Harian Singgalang, tanggal 1,2,3 Oktober 2009 atau tiga hari pasca gempa bumi.

tersebut, termasuk himbauan dari Gubernur Irwan Prayitno yang meminta orang Cina Padang untuk tidak meninggalkan kota Padang. (Kompas, 19 September 2010.)

Identitas Kewarganegaraan Subnasional dan Reposisi Etnis Cina terhadap Kebijakan Publik dan Politik Lokal: Suatu Kajian Awal

Untuk memahami posisi dan kondisi etnis Cina di Indonesia, selain harus menelusuri aspek historis juga harus memperhatikan pengaruh budaya lokal. Wang Gungwu menyebutkan 4 (empat) pilihan bagi seorang etnis Cina ketika akan menulis sejarahnya. *Pertama*, sejarah yang berorientasi kepada negeri leluhurnya (Tiongkok) dan *kedua*, memilih sejarah lokal sebagai orientasinya. Dua pilihan sama-sama bersifat dilematis dan tidak mudah untuk dilakukan. *Ketiga*, memilih sejarah dunia, yang mengidentifikasikan sejarah mereka dengan kemajuan umat manusia. Sedangkan *keempat*, etnis Cina akan 'meramu' sejarahnya sendiri. Artinya dalam dirinya terdapat berbagai macam sejarah, tidak hanya sejarah Cina dan lokal. (Wahid, 2003:71-72).

Sementara menyangkut konsep identitas, Thung Ju Lan menyatakan bahwa identitas merupakan masalah penting dalam pengkajian masalah etnis Cina. Alasannya, *pertama*, identitas merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan seseorang dimanapun ia berada dan merupakan subjektifitas yang menjadi landasan pertama dalam interaksi sosial. *Kedua*, bahwa identitas bersifat *belonging* dengan mengutip pendapat Jeffrey Week, tentang persamaan dan perbedaan seseorang dengan pihak lainnya. Konklusi yang penting dari pernyataan Thung Jul Lan, bahwa identitas ke-Cina-an pada dasarnya merupakan konstruksi sosial, yang senantiasa berubah sesuai pengaruh terpengaruh oleh kondisi zaman dan yang penting bahwa ia adalah merupakan sebuah pilihan. (*Ibid*).

Sejak rezim Orde Baru berkuasa berbagai kebijakan dikeluarkan menghalangi ekspresi kultural etnis Cina, yang pada gilirannya merupakan upaya integrasi dan asimilasi etnis Cina kedalam masyarakat Indonesia yang dipaksakan oleh penguasa Orba yang ternyata mengalami kegagalan, dari pelarangan merayakan hari besar keagamaan, penutupan sekolah berbahasa Cina, penerbitan mass media berbahasa Cina sampai pada upaya penggantian nama Cina menjadi nama lokal. Politik penghilangan identitas menjadikan kampung pondok, yang menjadi konsentrasi orang Cina di Padang semakin terisolir dan eksklusif.

Di kota Padang, sejak penganut Tri Dharama atau Sam Kauw Hwee dilarang oleh pemerintah Orba, banyak orang Cina Padang, yang berpindah agama seperti, agama Kristen, Katholik, Budha dan ada beberapa yang masuk Islam. Proses ini terjadi sebagai konsekuensi pencantuman identitas agama pemegang Kartu Penduduk Indonesia (KTP) untuk memilih agama besar tertentu yang diakui oleh negara. Fungsi Kelenteng tetap berjalan, sebagai ritual adat semata. Dalam bidang pendidikan, kurikulum pendidikan nasional kita, khususnya materi pelajaran agama, mewajibkan setiap peserta didik harus mengikuti salah satu pelajaran agama tertentu untuk kepentingan akademis. Sebagai akibatnya banyak anak-anak dari keluarga etnis Cina Padang yang berpindah menjadi penganut besar yang diakui oleh negara. Dan agama Katholik menjadi agama yang banyak dipilih oleh mereka, yakni dengan beberapa pertimbangan utama, antara lain; prosedur perpindahan agama yang mudah, dukungan lembaga Katholik dibidang pendidikan, bantuan sosial-ekonomi yang disediakan pihak gereja Katholik bagi anak-anak dari Etnis Cina Padang yang tidak mampu. Kebijakan perubahan membuat orang Cina Padang harus menyesuaikan antara mentaati aturan pemerintah Orba dan melindungi identitas kultural mereka, penggunaan yang mengadopsi nama-nam baptis dalam agama Katholik, seperti nama Johanness, Paulus dll, nama-nama lokal, seperti Munir, Lukman dsb, persamaan bunyi dengan nama sebelumnya, seperti marga Lie menjadi Gazali, Thio menjadi Sutiono dll, terjemahan nama Cina, seperti padanan kata Giok dengan Kumala serta nama-nam Eropa, seperti John, Paul dll. (Erniwati *op.cit*: 120-132).

Keberadaan HBT dan HTT memiliki peranan penting dalam membangun solidaritas diantara sesama etnis Cina, baik yang ada di kota Padang maupun yang ada di kota-kota lainnya di Sumatera Barata, seperti Padang panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh, bahkan mereka jaringan mereka sampai keluar propinsi Sumatera Barat, seperti di Sibolga, Pekanbaru dan Kepulauan Riau. Kedua organisasi ini berperan besar dalam menjaga stabilitas dan harmonisasi dengan kelompok etnis lainnya. Peran Tuako sebagai pimpinan perkumpulan ini memiliki peran yang besar untuk terpeliharanya etika *konfusianisme* dikalangan etnis Cina Padang. Organisasi sosial budaya berbasis identitas etnis ini, selain menekankan pada hubungan kekerabatan dan tanggung jawab kolektif juga menjadi simbol yang secara eksplisit tentang pemahaman akan asal-usul dan budaya mereka dihadapan budaya lainnya. (*Ibid* : 140-142).

Ketika reformasi bergulir, *euforia* kebebasan juga dirasakan oleh etnis

Cina di Padang. Hal yang paling tampak adalah perubahan perlakuan aparat pemerintah kota Padang dalam memperlakukan posisi etnis Cina sebagai bagian dari warga kota Padang yang sama dengan warga kota lainnya, khususnya dalam layanan birokrasi. Konstelasi politik lokal Cina Padang juga tidak terlepas dari angin perubahan ini. Ada 2 (dua) figur yang menonjol dalam perkumpulan marga (HBT dan HTT), yakni Lian Tjien Tek (HBT) dan Siangkasa Gani (HTT). Pada masa Orba figur Lian Tjien Tek, karena kedekatannya dengan penguasa dan posisi ekonominya yang kuat menjadi tokoh panutan bagi warga Cina Padang. Berkat koneksi dan jaringan yang kuat dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat lokal, etnis Cina yang terhimpun dalam HBT merasakan kemudahan dalam urusan dengan pemerintah. Akan tetapi kondisi mengalami perubahan ketika rezim Orba tumbang dan 'hilangnya' patron Lian Tjien Tek serta adanya tokoh baru serta keinginan melakukan perubahan kepemimpinan dalam organisasi HBT, akibatnya ketokohan Lian Tjien Tek memudar. Sebaliknya figur Siangkasa Gani dari HTT tetap dihormati karena integritas dan karisma kepemimpinan tidak tercemar akibat kedekatan dengan penguasa sebelumnya. Pergantian *Tuako* dalam tubuh HTT berjalan alamiah, yakni Siangkasa Gani yakni ada sebelumnya (*The A Go*) telah berusia lanjut, yang posisinya digantikan putranya, Feriyanto Gani. Dan memulai pemilihan secara demokratis untuk kepengurusan HTT (2003-2008), Feriyanto Gani terpilih sebagai pimpinan HTT. (*Ibid*:154-160).

Dalam konteks permasalahan HTT dan pemerintah kota Padang (Dinas Tata Ruang dan Bangunan, TRTB). Terkait upaya pembongkaran gapura HTT oleh pihak Satpol PP dengan dalih melanggar perda menjadi isu utama pada awal tahun 2012. (Haluan, 31 Jan 2012). Sebelumnya relasi yang kurang harmonis antara pihak Pemko Padang dengan etnis Cina pernah disuarakan oleh anggota DPRD yang mewakili daerah Pondok, sebagaimana dinyatakan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Albert Hendra yang merasa bahwa Pemko Padang kurang peduli terhadap masyarakat yang tinggal di daerah Pondok, seperti tidak adanya pembangunan drainase, roil, jalan dan pembangunan lainnya. Bahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa kurang diprioritaskan. Dan yang lebih mengecewakan pihak Pemko Padang lebih tanggap, seandainya ada warga pondok yang berurusan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang menyangkut bayar membayar. (Haluan, 27 Nov 2012).

Bahkan warga Cina yang tergabung dalam HTT mengeluarkan pernyataan sikap yang bernada ancaman yakni 'kami siap perang' kepada

pihak Pemko Padang yang bersikeras hendak membongkar gapura yang dibangun oleh kelompok etnik Cina Padang tergabung dalam HTT. (Haluan, 7 Feb 2012). Pernyataan yang penting dikemukakan disini adalah mendahulukan perda sebagai keputusan publik atau adanya penafsiran yang kurang pas terhadap perda itu sendiri, yang berdampak pada keberadaan gapura yang dibangun oleh HTT, baik oleh Pemko atau pihak HTT yang berselisih. Persoalan gapura HTT semula merupakan persoalan merk gapura HTT, yang kemudian berubah pelanggaran atas Perda N0. 06 tahun 2007 tentang IMB. Bahkan sampai tanggal 8 Februari 2012 belum ada kata sepakat antara pihak Pemko Padang dengan HTT. (Haluan, 9 Fe 2012). Bahkan pihak legislatif Kota Padang sudah berinisiatif menyelesaikan persolan secara damai dengan memanggil kedua belah yang bersengketa (Haluan, 8 Feb 2012).

Karena jalur mediasi secara formal tidak memperoleh keputusan yang memuaskan, maka pihak HTT membawa permasalahan ini ke ranah hukum. HTT sebagai penggugat, yang diwakili oleh *Tuako*, Feriyanto Gani mengajukan gugatan ke PTUN Padang dengan no.03/G/2012/PTUN, tanggal 10 Februari 2012 kepada pihak Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dian Fakri, sebagai tergugat. Sedangkan menanggapi rencana pembongkaran, Albert Hendra Lukman yang juga bertindak sebagai bendahara HTT, mengaku pasrah seandainya gapura HTT hendak dibongkar paksa. (Haluan, 14 Feb 2012). Bahkan salah seorang anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Erison meminta pihak Pemko Padang lebih arif menyikapi, sebab gapura HTT merupakan identitas kota tua dan wisata. Dan dilain pihak ia juga menyorot tentang perlu pihak Pemko Padang juga mengevaluasi keberadaan gapura-gapura lainnya, sehingga tidak terkesann tebang pilih. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung pada tanggal 8 Mei 2012, pihak HTT, yang diwakili oelh Djuanda Rasul tetap menyatakan gugatan untuk membatalkan Surat Perintah Bongkar Gapura No.640/2.04/DTRTB-P.P/2012 tanggal 12 Februari yang diterbitkan oleh Dinas TRTB Padang. (Haluan, 9 Mei 2012). Akhirnya setelah dikeluarkan amar putusan hakim PTUN, pada tangga 29 Mei 2005, yang mengabulkan gugatan HTT, dimana dalam salah satu amarnya menyebutkan bahwa gapuran HTT merupakan bangunan dan bukan gedung. (Haluan, 30 Mei 2012). Fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak HTT sendiri telah mengurus IMB serta meminta rekomendasi izin kepada Walikota Padang, maka sementara waktu menyangkut perselisihan gapura HTT dengan Pemko untuk sementara surut. Meski demikian tidak penutup

akan munculnya perselisihan lain menyangkut 'simbol-simbol' kultural etnis Cina lainnya di masa yang akan datang. Menumbuhkan kesadaran untuk menghargai perbedaan itu menjadi sikap kultural penting, di tengah usaha membangun kebersamaan dan solidaritas sosial, sebagaimana disuarakan oleh W. Kymlicka tentang pentingnya untuk mengedepankan politik multikultural yakni pengakuan keberagaman kebudayaan yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok yang termarginalisasi dapat terintegrasi dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui menjadi pemikiran bersama semua elemen anak bangsa. (Kymlicka, 2003)

Simpulan

Kota Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat, yang menjadi salah pusat konsentrasi etnis Cina di Sumatera Barat, memperlihatkan dinamika hubungan yang menarik, menyangkut relasi antara etnis minoritas (Cina) dengan masyarakat lokal dan pemerintah kota sebagai pengambil kebijakan publik. Mayoritas etnis Cina Padang yang tinggal di Kampung Pondok merupakan memiliki identitas yang tidak saja berbeda dengan penduduk lokal, akan tetapi berbeda dengan penduduk Cina yang ada di kota-kota lainnya di Indonesia. Pengalaman sejarah dan budaya yang panjang, yang mempertautkan mereka, baik dengan rezim penguasa yang senantiasa berubah maupun dengan masyarakat lokal, menjadikan etnis Cina Padang, memiliki pilihan untuk menentukan identitas mana yang akan dipilih yang sesuai dengan konstruksi sosial dimana mereka tinggal.

Karena sebagian besar etnis Cina di Padang, bergerak dilapangan ekonomi-perdagangan, maka pilihan untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi-perdagangan menjadi lebih rasional. Meskipun pilihan profesi lain terbuka lebar pasca reformasi 1998, akan tetapi sektor ini, tetapi menjadi tumpuan utama, karena telah diwariskan secara turun-temurun. Di kota Padang terdapat 2 (dua) perkumpulan marga yang bergerak dibidang sosial dan budaya, yang juga merepresentasikan keberadaan mereka di kota ini, yakni HBT dan HTT. Kedua organisasi yang telah berusia ratusan tahun dan mengakar dalam kehidupan sosial warga Cina Padang, memperlihatkan lanskap pemikiran dan arsitektur politil lokal Cina Padang yang menarik terkait dengan pasang-surut perubahan rezim penguasa.

Dalam konteks urgensi penguatan identitas simbol yang dimiliki etnis Cina di daerah Pondo, terlihat dengan jelas dan gambalang, bahwa sejak

bergulirnya reformasi upaya untuk mengekspresikan identitas kultural muali mendapat ruang yang memadai. Ruang publik menjadi medan pertarungan untuk mengukuhkan identitas mereka di tengah kelompok lainnya, baik yang berasal dari etnis yang sama atau kelompok etnis lainnya. Dalam kasus terkait rencana pembongkaran gapura HTT dengan pihak Pemko Padang (Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan), meskipun hanya sekedar persoalan kurang terjalinya komunikasi yang harmonis, serta sikap yang kurang berempati dari pihak pengambil kebijakan publik. Persoalannya menjadi rumit ketika kedua belah harus mengedepankan sisi yuridis-formal, tanpa mengindahkan argumentasi sosio-kultural yang terpantul dalam simbol-simbol tertentu, yang menjadi penanda dan representasi identitas kultural yang dimiliki oleh sebuah kelompok sosial tertentu dalam interaksinya dengan masyarakat luas dimana mereka berada.

Daftar Pustaka

Buku

- Amran, Rusli, *Padang Riwayatmu Dulu*, Cetakan ke II, Jakarta: CV. Yasaguna, 1988.
- Asnan, Gusti, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Azwar, Sativi Sutan, *Antakesuma Suji Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Colombijn, Freek, *Paco-Paco (Kota) Padang, Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Pengantar Eko Alvarez, Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Djohan, Eniarti B, *Mengapa Kajian Bencana? Dalam dalam Masyarakat Indonesia*, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIII, No. 2. Jakarta: LIPI, 2007.
- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, SumateraTengah 1784-1847*, Jakarta: INIS, 1992.
- Effendi, Nursyirwan, *Bencana: Pengalaman dan Nilai Budaya Orang Minangkabau dalam Masyarakat Indonesia*, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIII, No. 2. Jakarta: LIPI, 2007.
- Erniwati, *Cina Padang Dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau: Dari Revolusi Sampai Reformasi*, Disertasi yang belum diterbitkan, Jakarta: FIB UI, 2011.
- Gulo, Anatona, 'Kebudayaan Minangkabau dan Komunitas Orang Nias di Kota Padang, *Makalaj dalam Diskusi Panel Padang Dari Masa Ke Masa*, Padang: Padang Forum & Ninik Mamak Suku.
- Graves, Elizabeth E, *Asal-Usul Elit Minangkabau Modern, Respon terhadap*

- Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: YOI, 2007.
- Jasmi, Khairul (ed), *Duka Lara Gempa Padang*, Padang: Pemko Padang, 2009.
- Kymlicka, Will, *Kewarnegaran Multikultural*, Pengantar F. Budi hardiman. Jakarta: Lp3ES, 2002.
- Mansoer, M.D, *Sedjarah Minangkabau*, Djakarta: Bhratara, 1970.
- Naim, Mochtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafitipers, 1986.
- Pattiradjawane Rene L, 'Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis di Indonesia', dalam *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 2001,
- Poerwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspekti Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- , *Orang Cina Khek dari Singkawang*, Depok: Komunitas Bambu, 2005.
- Reportase Eksklusif Harian Singgalang: *Gempa Dahsyat Sumatera Barat*. Padang: Genta Singgalang Press, 2010.
- Radjab, Muhammad, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1833)*. Jakarta: Balai Pustaka. 1964.
- Shiraishi, Takashi, "*Zaman Bergerak*", *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Grafiti Press, Jakarta, 1997.
- Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pres, 1984.
- Suryadinata, Leo dkk, *Penduduk Indonesai, Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Toer, Pramoedya Ananta, *Hoakiau di Indonesia*, Garba Budaya, Jakarta, 1988.
- Wahid, Abdul, 'Proses Menjadi (Tidak) Indonesia? Persepsi dan Memori-Rakyat Tionghoa di Yogyakarta' dalam Budi Susanto, S.J (ed), *Identritas dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Surat Kabar

- Kompas, 19 Sepetember 2010.
- Singgalang, 1 Oktober 2009.
- , 2 Oktober 2009.
- , 3 Oktober 2009.
- Haluan, 27 November 2011.
- Haluan, 31 Januari 2011.
- , 7 Februari 2011.
- , 8 Februari 2012.
- , 9 Februari 2012.
- , 14 Februari 2012.
- , 9 Mei 2012.
- , 30 Mei 2012.